

**PERAN BUPATI dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM DALAM PERENCANAAN  
DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) PADA APBD  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2011-2013**

Oleh:

Eraisha Valensia - 14010111120011

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract**

Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) is planning and budgeting arranged by considering four aspects: access, participation, control, and benefits which are conducted equitably between women and men. Through Permendagri No. 67 in 2011, PPRG becomes one of the tools to improve gender equality and justice in implementing the gender mainstreaming (PUG) strategy in a region.

This study was conducted to determine the role of Regent Widya Kandi Susanti in planning and budgeting the gender responsive local budgets. It also describes various problems in the field such as enabling and inhabiting factors both from within and from outside, so that the influence of women as the head of a region in gender responsive planning and budgeting to implement gender mainstreaming in Kendal Regency is known. The method of the study used was qualitative description. Primary data source was gathered through interview using purposive sampling technique, while secondary data were obtained from document, archive and other sources relating to the study. The analysis used qualitative data analysis technique by reducing data, presenting data, and drawing conclusion or verification.

The research result shows that Regent Widya Kandi Susanti's commitment in reducing gender discrepancy is written in the vision and mission of Kendal Regency RPJMD and who more of a role in the implementing PPRG in Kendal Regency are PUG teams. The obstacles in implementing PPRG in Kendal Regency is the existence of official rotation which is too fast, the absence of regional regulation on the implementing PPRG and the lack of public official knowledge regarding gender causes PPRG has not been implemented effectively in each SKPD, and gender responsive budget allocation in Kendal Regency Budgets year 2011-2013 remains neutral.

Recommendations that can be given are Kendal Regency Government should give commitment and support through local regulations to assure the implementation of gender responsive budget in planning, budgeting, monitoring, and evaluating activities. Public officials also need to obtain gender responsive budget training sustainably in developing the appropriate understanding regarding gender responsive budget.

***Keywords: Gender Responsive Planning and Budgeting, Responsive Budget, Kendal Regency.***

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini dalam era reformasi masih banyak kaum perempuan di Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan seperti sulitnya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta masih adanya kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Perempuan adalah sasaran utama yang akan terkena dampak apabila sebuah kebijakan pemerintah diterapkan. Banyak perempuan yang memiliki hak dan aspirasi yang perlu diterjemahkan kedalam regulasi, ketimpangan dalam sosial politik menyebabkan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh daerah di Indonesia banyak yang bersifat diskriminasi gender. Hal itu disebabkan karena kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan belum memperhatikan lebih dahulu dampak bagi perempuan sebagai anggota masyarakat yang dinilai sebagai kaum yang lemah.

Pembangunan yang memiliki kesetaraan gender dapat dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dilihat dari IPM, IDG, dan IPG Kabupaten Kendal manfaat yang diperoleh perempuan dalam bidang pembangunan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki dan masih terdapat disparitas gender. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi bagian tersendiri dalam rangka pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan di daerah, ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah dan RPJM 2010-2014 mempertegas upaya pemerintah untuk mengarusutamakan gender dengan penekanan lebih lanjut pada perbaikan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan mempertimbangkannya dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. PPRG menjadi salah satu *tools* untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Aturan ini memuat kebijakan perencanaan dan penganggaran dimana PPRG dipandang sebagai upaya pada tataran operasional untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan.<sup>1</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 pasal 9 menyebutkan bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada APBN, dan APBD untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota sekurang-kurangnya minimal sebesar 5 % dari APBD provinsi, kabupaten dan kota, jika kurang dari 5% maka APBD pada daerah tersebut tidak dikatakan responsif gender. Kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, dalam keputusan tersebut terdapat perbedaan konsep pembiayaan pengarusutamaan gender di daerah, pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 Tahun 2003 menetapkan pembiayaan pengarusutamaan gender minimal 5%, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tidak ada batas minimum dalam pembiayaan untuk pengarusutamaan gender, hal tersebut dikarenakan untuk responsif terhadap gender tidak ada batas minimum atau penganggaran yang di batasi dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 penganggaran yang diperuntukan untuk pengarusutamaan gender dilakukan secara menyeluruh, karena jika dilakukan secara

---

<sup>1</sup> *Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah*. Diakses melalui: [www.blog.pattiro.com](http://www.blog.pattiro.com) pada tanggal 1 November 2013, pukul 18:40 WIB.

menyeluruh, manfaat anggaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan dapat dinikmati secara luas oleh laki-laki dan perempuan.

Terdapat 34 isu gender yang ada di berbagai bidang di Kabupaten, perlu adanya prioritas anggaran yang mengarah pada program-program yang menunjang peningkatan dan kepentingan gender pada APBD Kabupaten Kendal. Posisi perempuan dalam proses penganggaran yang masih minim dan sebagian besar aktor dalam proses perencanaan, pembahasan, penyusunan maupun pelaksanaan didominasi oleh kaum laki-laki. Ini menyebabkan anggaran yang disusun masih ada yang bersifat bias gender. Laki-laki yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang gender mengakibatkan anggaran yang disusun identik hanya berdasarkan dengan pemberdayaan perempuan saja seperti program PKK.

Kabupaten Kendal saat ini dipimpin oleh Bupati Dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dan wakil Bupati Mustamsikin yang memperoleh kemenangan 42% Pilkada Kabupaten Kendal. Melalui Perda Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011, ditetapkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 yang merupakan penjabaran visi dan misi program dari bupati terpilih dalam menjalankan pemerintahannya periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Visi dari pembangunan Kabupaten Kendal salah satunya menjadikan Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten yang sejahtera baik secara lahir maupun batin. Sedangkan salah satu misi Bupati Widya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam RPJMD Kabupaten Kendal adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Kesetaraan yang dimaksud adalah kemudahan dalam memperoleh akses dan manfaat dari berbagai pelayanan publik, partisipasi dalam kegiatan pembangunan serta jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan, agar tidak ada ketimpangan antara keduanya.

Dengan adanya visi misi yang berkaitan dengan gender dalam RPJMD tersebut diharapkan dalam penyusunan rencana anggaran daerah Bupati dan Wakil Bupati Kendal memperhatikan aspek ketimpangan gender dalam pembangunan daerah Kabupaten Kendal. Namun walaupun dipimpin oleh seorang perempuan Kabupaten Kendal belum menjadi kabupaten yang ramah terhadap perempuan. Hasil kajian dari PATTIRO pada pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Kendal tahun 2010, mengungkapkan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), secara kelembagaan sudah baik. Pemda telah membentuk kelembagaan seperti Tim Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG), Tim Anggaran Responsif Gender, Pokja PUG dan *Focal Point* PUG. Namun belum melakukan analisa gender dalam penyusunan anggaran dan menyediakan wahana khusus. Data pilah yang tersedia di Dinas Pendidikan belum digunakan untuk membuat analisa gender dalam anggaran.<sup>2</sup>

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai anggaran responsif gender dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2011-2013 sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana peran Bupati Widya Kandi Susanti serta kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan penganggaran anggaran responsif gender APBD Kabupaten Kendal dalam tiga tahun kepemimpinannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bupati Widya Kandi Susanti dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun 2011-2013, serta hambatan Bupati Widya Kandi Susanti dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun 2011-2013.

---

<sup>2</sup> Indandit, Arifin Al. 2011. *Hasil Kajian Pengelolaan Anggaran Daerah, Kendal Tahun 2010*. Diakses melalui [www.sekorakyat.org](http://www.sekorakyat.org), pada tanggal 6 Februari 2015 pukul 20:00 WIB.

Ada beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori peran, gender dan anggaran responsif gender. Salah satu dari teori tersebut adalah teori peran dari *Merton*, Bupati/Walikota adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik yang akan disediakan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam hal ini bupati/walikota harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilih. Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Setelah selesai penyusunan APBD untuk suatu tahun anggaran tertentu, bupati/walikota segera mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DPRD.<sup>3</sup> Oleh karena itu Bupati mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut: *Leading, Planning, Organizing, Controlling, Budgeting*.

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Data-data yang penulis peroleh adalah data primer melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen seperti data APBD Kabupaten Kendal periode tahun 2011-2013, dokumen RAPBD Kabupaten Kendal periode tahun 2011-2013, PPA Kabupaten Kendal periode tahun 2011-2013, KUA Kabupaten Kendal periode tahun 2011-2013. Kemudian data yang diperoleh penulis dilakukan melalui tahap pengujian mulai dari analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **II. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam karya ilmiah skripsi ini akan dipaparkan analisis tentang Peran Bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada APBD Kabuapten Kendal Tahun 2011-2013 Berikut adalah uraian pembahasan hasil penelitian.

### **2.1 PPRG Sebagai Satu Alat Untuk Mencapai Pengarustamaan Gender di Kabupaten Kendal.**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional integrasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Kendal terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

#### **2.1.1 Akses dan Partisipasi Perempuan dalam PPRG Untuk Mencapai Pengarustamaan Gender Di Kabupaten Kendal.**

Pada tahun 2011 Kabupaten Kendal dalam proses penyusunan APBD sudah melibatkan masyarakat, secara legal formal pelibatan masyarakat tersebut dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal sebagian besar telah terpenuhi. Melalui musrenbang mereka dilibatkan sampai pada tiga tahapan yaitu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan pada tingkat kabupaten. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Joko,<sup>4</sup> Beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>3</sup> *Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Yayasan Asia (*the Asia Foundation*). Dalam Sistem Penganggaran Pemerintah. Diakses melalui [www.saifulrahman.lecture.ub.ac.id](http://www.saifulrahman.lecture.ub.ac.id) pada tanggal 6 Februari pukul 15:00 WIB.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Joko Hartoto, MM selaku Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015.

“Bentuk partisipasi masyarakat terlihat dalam setiap jenjang perencanaan pembangunan yang dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa sampai tingkat kabupaten.”

Di Kabupaten Kendal dalam proses penyusunan APBD sudah melibatkan partisipasi masyarakat perempuan, partisipasi tersebut di mulai pada tahap paling rendah yaitu Musrenbang desa sampai dengan kabupaten, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahab,<sup>5</sup> pada wawancara berikut ini:

“Musrenbangdes pengantar di setiap kegiatan kita, kita itu minta keterlibatan stakeholder yang tidak hanya perempuan bahkan anak-anak sekolah kan sudah ada sih mbak SMA, Tomas (Tokoh Masyarakat), tokoh agama, itu sudah harus diperhitungkan disitu berapa persen keterlibatan mereka dalam penyusunan anggaran, *jenengan* (kamu) dibuka Permendagri nomor berapa itu, anak sekolah pun sudah harus dilibatkan dalam proses anggaran di tingkat paling bawah.”

Melalui Musrenbang partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah di Kabupaten Kendal cukup signifikan dalam mempengaruhi anggaran daerah, dan diharapkan dengan mudahnya akses perempuan untuk memperoleh informasi dan ikut berpartisipasi dalam proses Musrenbang dapat mewujudkan anggaran daerah yang berorientasi kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan perempuan di daerah Kabupaten Kendal.

### **2.1.2 Kontrol dalam Melaksanakan PPRG dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kendal.**

Di Kabupaten Kendal sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan publik, seperti Ibu Widya Kandi Susanti yang menjabat sebagai Bupati Kendal, hal tersebut sebenarnya memudahkan kaum perempuan yang duduk dalam jabatan publik untuk mengontrol pengalokasian anggaran yang responsif gender dalam anggaran daerah serta sumberdaya pembangunan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joko,<sup>6</sup> yang menyebutkan bahwa:

“Kesempatan perempuan mengakses anggaran sangat besar, karena Bupati Kendal seorang wanita disamping itu banyak kepala SKPD yang juga perempuan.”

Mudahnya akses perempuan untuk masuk dan duduk dalam jabatan publik belum bisa mengurangi kesenjangan gender yang masih terjadi di Kabupaten Kendal, hal ini disebabkan posisi perempuan dalam penganggaran masih marginal, dan sebagian besar posisi dalam pengambilan keputusan baik dalam penyusunan, pembahasan, pelaksanaan maupun pengawasan program masih di dominasi oleh kaum laki-laki, sehingga anggaran yang ada masih minim akan mengakomodasi kepentingan strategis perempuan di Kabupaten Kendal.

### **2.1.3 Manfaat PPRG dalam pencapaian pengarusutamaan gender di Kabupaten Kendal.**

Output atau manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di Kabupaten Kendal adalah memastikan apakah

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Abdul Wahab, S.Sos., MIDS, M.Eng selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Joko Hartoto, MM selaku Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015.

perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan setara serta memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan di Kabupaten Kendal.

## 2.2 Peran Bupati dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada APBD Kabupaten Kendal.

### 2.2.1 Peran Bupati Dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dalam penyusunan anggaran responsif gender dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011-2013.

Salah satu misi Bupati Widya Kandi Susanti dalam RPJMD Kabupaten Kendal yaitu meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM.

1. Planning  
Komitmen Bupati Widya Kandi Susanti dalam mengurangi kesetaraan gender di Kabupaten Kendal tertuang dalam RPJMD dan dalam penyusunan anggaran daerah selalu mengusulkan anggaran responsif gender pada APBD Kabupaten Kendal.
2. Budgeting  
Anggaran responsif gender yang terdapat pada APBD setiap tahunnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kendal.
3. Leading  
Sebagai kepala daerah Bupati Widya selalu memberi arahan kepada TPAD untuk merencanakan dan menganggarkan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.
4. Organizing  
Bupati Widya mengarahkan kepada TPAD untuk menyusun anggaran yang responsif gender pada APBD sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2010-2015.
5. Controlling  
Anggaran responsif gender belum berjalan maksimal dan menjadi prioritas utama dalam penganggaran APBD, akan tetapi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 anggaran yang responsif gender selalu dianggarkan dan meningkat.

Dalam program yang ditujukan untuk masyarakat masih perlu diketahui responsifitasnya terhadap gender, oleh karena itu pada tabel berikutnya akan dijelaskan berapa proporsi anggaran responsif gender dalam alokasi belanja langsung pada APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2011-2013.

**Tabel 3.5**  
**Proporsi Anggaran Responsif Gender pada APBD Kabupaten Kendal**  
**Tahun Anggaran 2011-2013**

Pos	Realisasi Anggaran	2011	2012	2013
A	Total Belanja	1.180.653.574.822	1.266.188.689.685	1.462.271.174.250
B	Belanja Langsung	540.227.044.613	522.793.705.237	615.941.671.837
	Proporsi Terhadap A (%)	45,76%	41,29%	42.12%
C	Jumlah Anggaran Responsif Gender pada APBD Kabupaten Kendal	13.106.473.650	126.587.744.340	105.407.316.802
	Terhadap A (%)	1,1%	10%	7,2%

Sumber: Diolah Dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011-2013 berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Perhitungan pada tabel tersebut berdasarkan pada perhitungan rasio keserasian belanja, rasio keserasian belanja menunjukkan seberapa besar pemerintah berkomitmen pada urusan tertentu dan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja yang terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat alokasi, distribusi dan stabilisasi. Analisis belanja per-fungsi terhadap total belanja.

$$\text{Rasio Anggaran Responsif Gender} = \frac{\text{Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan tersebut diperoleh hasil jumlah proporsi anggaran responsif gender terhadap belanja pada APBD Kabupaten Kendal pada tahun 2011 yaitu 1%, pada tahun 2012 meningkat menjadi 10% dan pada tahun 2013 menurun menjadi 7,2%. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh jumlah belanja langsung pada APBD tersebut dan ada tidaknya program yang responsif gender di tahun tersebut.

### 2.2.2 Peran Bupati Dr. Hj. Widya Kandi Susanti dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif (PPRG) Gender Kabupaten Kendal.

Dalam rakor Tim Penyusunan Anggaran Daerah Bupati Widya Kandi selalu memberi usulan mengenai anggaran berbasis gender dalam perencanaan dan penganggaran APBD menentukan prioritas kebijakan dan anggaran berbasis gender dalam hal mengurangi kesenjangan gender di Kabupaten Kendal. Hasil dari wawancara narasumber menyiratkan bahwa peran Bupati dalam PPRG sebenarnya ada dalam tingkat eksekutif. Komitmen Bupati dalam memperhatikan kesenjangan dan isu-isu gender sudah ada dalam visi misi dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2010-2015.

Bupati Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan PUG dan dalam setiap rapat koordinasi Pokja PUG turut menghadirkan Bupati melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor: 411.4/263/2012. Adanya dukungan politik (*political will*) dari Bupati Kabupaten Kendal merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG disertai dengan Sumberdaya Manusia yang memadai, akan tetapi sampai dengan saat ini sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Kendal masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Minimnya kualitas dilihat dari pemahaman oleh aparatur tentang gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih kurang, sedangkan dari segi kuantitas dilihat dari perwakilan yang dikirimkan oleh SKPD dalam mengikuti koordinasi hanya orang yang sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama ini pengetahuan tentang gender belum tersebar luaskan secara baik.

### 2.3 Hambatan Bupati dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal.

Faktor yang mendukung berhasil atau tidaknya pelaksanaan PPRG di Kabupaten Kendal dalam mewujudkan PUG tergantung pada aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan PPRG dan dukungan serta komitmen pejabat publik terhadap PUG. Bupati merupakan aktor sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan PUG di Kab Kendal, sedangkan Tim Pokja PUG dan Tim Teknis Pokja PUG merupakan pelaksana PPRG di lapangan. Dalam pelaksanaan PPRG tersebut terdapat beberapa kendala yang membuat PPRG di Kabupaten Kendal belum bisa berjalan dengan optimal, hambatan tersebut yaitu:

1. Rotasi perpindahan pejabat di SKPD Kabupaten Kendal yang terlalu cepat. Setiap 3 bulan terjadi rotasi perpindahan pejabat SKPD di Kabupaten Kendal.

2. Pelatihan PPRG dalam penyusunan kegiatan anggaran SKPD pada unit kerja belum dilaksanakan pada masing-masing SKPD, walaupun pelatihan PPRG sudah disosialisasikan pada tahun 2012 pada masing-masing perwakilan SKPD.
3. Pemahaman aparatur dan pejabat pada masing-masing SKPD mengenai pentingnya data pilah gender secara teknis untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang.
4. Komitmen pelaksanaan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 baru dilaksanakan di tingkat eksekutif, untuk advokasi di tingkat legislatif belum disosialisasikan.
5. Sosialisasi pengarusutamaan gender pada unit kerja belum dilaksanakan pada masing-masing SKPD, walaupun pada tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi PUG yang dihadiri perwakilan dari masing-masing SKPD. Mereka secara teknis belum memahami bagaimana aplikasi PUG dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

### III. PENUTUP

Menurut temuan dan hasil analisis data yang didapatkan pada proses penelitian mengenai peran Bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun 2011-2013, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Bupati Widya Kandi Susanti dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender ditunjukkan dengan komitmen beliau yang terdapat dalam visi misi RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2010-2015, akan tetapi komitmen tersebut belum didukung oleh Surat Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan PPRG di Kabupaten Kendal. Aktor yang paling berperan dalam pelaksanaan PPRG di Kabupaten Kendal adalah Tim Pokja PUG yang diketuai oleh Bappeda dan BPPKB sebagai sekretaris.
2. Hasil pengkategorian menurut pos anggaran telah menunjukkan terdapatnya pos anggaran responsif gender di dalam belanja APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011-2013, terjadi peningkatan anggaran responsif gender dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan pada tahun 2013 terjadi penurunan, hal tersebut dikarenakan perbedaan pos anggaran pada masing-masing SKPD di tiga tahun periode anggaran APBD. Proporsi jumlah pos anggaran yang dinilai responsif gender dari tahun ketahun masih mengalami penurunan dan anggaran responsif gender belum menjadi prioritas dalam menentukan arah kebijakan anggaran di Kabupaten Kendal. Masih minimnya kesadaran pejabat publik di Kabupaten Kendal dalam mengusung anggaran responsif gender di setiap rencana kegiatan program dan anggaran responsif gender di kalangan pejabat publik masih diasumsikan sebagai anggaran perempuan.
3. Dalam menjalankan perannya sebagai kepala daerah, Ibu Widya Kandi Susanti dihadapkan dengan faktor pendukung dan penghambat baik secara kultural maupun struktural dalam proses pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2011-2013. Faktor pendukung dari segi kultural yaitu sudah adanya partisipasi perempuan di Kabupaten Kendal dalam jabatan publik semakin meningkat memudahkan untuk memperoleh informasi anggaran responsif gender pada anggaran daerah. Hambatan Bupati Widya Kandi dan Tim Pokja PUG dalam proses pelaksanaan PPRG di Kabupaten Kendal dari segi kultural yaitu lemahnya



transformasi kesadaran lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan mereka dan minimnya pemahaman pejabat publik akan gender. Sedangkan hambatan dari segi struktural yaitu belum adanya surat keputusan maupun perda yang mengatur PPRG di Kabupaten Kendal, rotasi pejabat di Kabupaten Kendal yang terlalu cepat, kerjasama antara Tim Pokja PUG Kabupaten Kendal belum maksimal, belum ada sosialisasi pelaksanaan PPRG di tingkat legislatif dan anggaran responsif gender dalam APBD Kabupaten Kendal belum menjadi prioritas anggaran.

## REFERENSI

### **Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asshiddique, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dewi. R, Susana. 2006. *Tips dan Trik Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
- Fakih, Fansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima*. Bandung: Mutiara Press.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Innes, Melissa (ed). 2000. *Accelerating Change: Resources for Gender Mainstreaming*. CIDA, Asia Branch.
- Ken Menzies. 1982. *Sociological Theory in Use*, Routledge & Kegan Paul, London. Dalam Usman, Sunyoto. 2004. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIRED).
- Mastuti, Sri, et.al. 2007. *Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CiBa).
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Murniati, A. Nunuk. P. 2004. *Getar Gender*. Magelang: Yayasan Adikarya IKAPI.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurkholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawa Pers.
- Rasyid, M. Ryasis, Drs. H. Syaukani dan HR. Prof. Dr. Afan Gaffar. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puspitawati, Herien . 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Sadli, Saparinah, Imelda Bachtiar. 2010. *Berbeda tetapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Wanita*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastria Yani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Semiawan, Coony. R. *Metode Penelitian Kulitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Slamet, Y. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: CIRED (Center for Indonesian Research and Development).
- W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Wirawan, Sarwono Sarlito. 2005. *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Dokumen**

- Kabupaten Kendal dalam Angka 2010-2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2012. Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Laporan Akhir Kegiatan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 Kabupaten Kendal. 2012.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA). 2011. Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jakarta: CV. Permata Andhika.
- Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Lembaga. 2012. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

### **Hasil Penelitian dan Tesis**

*Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Yayasan Asia (*the Asia Foundation*). Dalam Sistem Penganggaran Pemerintah. Diakses dari [www.saifulrahman.lecture.ub.ac.id](http://www.saifulrahman.lecture.ub.ac.id) pada tanggal 6 Februari pukul 15:00 WIB.

Idrus, Muhammad dan Dra. Fransiska I.R. Dewi, M.Si. *Konstruksi Gender dalam Budaya*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta: Fakultas Psikologi.

Dwi, Hastuti. 2010. *Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender*. Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010. UNS: Ilmu Administrasi FISIP.

Indandit, Arifin Al. 2011. *Hasil Kajian Pengelolaan Anggaran Daerah, Kendal 2010*. Diakses dari [www.sekorakyat.org](http://www.sekorakyat.org) pada tanggal 6 Februari 2015 pukul 20:00 WIB.

Nordiana, Emma. 2008. *Anggaran Berbasis Gender: Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Kendal Tahun 2006-2008*. UNDIP: Ilmu Pemerintahan FISIP.

### **Jurnal**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kertas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. *Pengarustamaan Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Methods Research dalam Tashakkori & Teddlie (Eds). *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*, 351-384. London: Sage Publications, Inc. Dalam Syahri, Indawan. *Mixed Methods dalam Penelitian Bahasa*. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 19:00 WIB.

Kertas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. *Modul Pelatihan Fasilitator, Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG) Kementerian*. Jakarta: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/ Lembaga. 2012. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ramkumar, Vivek. *Uang Kami Tanggung Jawab Kami Upaya Masyarakat Sipil untuk Memantau dan Mempengaruhi Kualitas Pembelanjaan Pemerintah*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).

Ruslan, Murniati. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender*. Musawa. Vol. 2.

### **Peraturan**

Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah pasal 3.

Peraturan Presiden No.39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006. Jakarta: CV Tamita Utama.

### **Situs Internet**

[www.blog.pattiro.com](http://www.blog.pattiro.com)

<http://hariansemarangbanget.blogspot.com>

[www.isukomunikasi.blogspot.com](http://www.isukomunikasi.blogspot.com)

[www.jateng.tribunnews.com](http://www.jateng.tribunnews.com)

[www.jodenmot.wordpress.com](http://www.jodenmot.wordpress.com)

<http://www.kalyanamitra.or.id>

[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)

[www.rahmayanisembiring.blogspot.com](http://www.rahmayanisembiring.blogspot.com)

<http://regional.kompas.com>